

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanata. (2017). Budaya Dan Perilaku Berjudi: Kasus tajen Di Bali. *Jurnal Ilmu Perilaku ISSN (Online) 2581-0421*, 1(1).
- Asshiddiqie. (2015). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Djamali. (2012). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA* (Kedelapan). Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- E.S Nurbani & HS. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Pertama). Bogor: PT GHALIA INDONESIA.
- Fendri. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah* (Pertama). Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hamidi, Arrsa, Fadhilah, Mauntie, Annafi, I. (2012). *Teori Dan Hukum* (Pertama). Malang: UB PRESS.
- Hasanah. (2015). Word Of Mouth Judi Online Di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi) ISSN 2442-4005*, 1(2).
- Hutagalung, Ibrahim, S. (2010). Penegakkan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Di Kalangan Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. *Jurnal Legalitas ISSN 2085-0212*, 1(3).
- Manulang. (2016). *Legisme, legalitas Dan Kepastian Hukum* (Pertama). Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Marzuki. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ke Tujuh). Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Monteiro. (2016). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH* (Pertama). Yogyakarta: PUSTAKA YUSTISIA.
- Muliadi. (2014). *Politik Hukum* (Ke Dua). Padang: AKADEMIA PERMATA.

- Rifai. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Ke Tiga)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizal. (2015). Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut KUHP. *Jurnal Keadilan ISSN 2355-5130*, 2(1).
- Rumokoy. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum (Pertama)*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Santoso, Wahyuningsih, M. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum ISSN 2614-560X*, 1(1).
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syuhada. (2014). Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polsek Cigasong Majalengka. *Jurnal Publicitas ISSN 1978-0168*, 8(3).
- Widjaja. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Empat)*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Peraturan Daerah Kota Batam Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001
Tentang Kepariwisata Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18 Seri C

.
Peraturan Daerah Kota Batam Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Kepariwisata Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 30 Seri C.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52 Seri C.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105.